

## Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan di Indonesia

Antin Okfitasari<sup>1)</sup>, Sundari<sup>2)</sup>, Ety Meikhati<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Manajemen Informatika Univ. Duta Bangsa Ska

\*Email korespondensi: [antin\\_okfitasari@udb.ac.id](mailto:antin_okfitasari@udb.ac.id)

### Abstract

*This research is aimed to examine the impact of local governmental characteristics and audit opinion on the timeliness of local governmental financial statement. The characteristics of local governmental will be measured by using the size of the area, regional wealth (PAD), status and governmental spending. All of the samples are 453 City across Indonesia that has profile report as regulated by BPK database on 2014. The results showed the size of local governmental had positive effect totimeliness but the governmental revenue had negative effect. The others variables, governmental status, governmental spending and audit opinion, had no significant effect to timeliness.*

**Keywords:** *timeliness, local governmental characteristics, PAD, audit opinion*

**Saran sitasi:** Okfitasari, A., Sundari., & Meikhati, E. (2020). Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 14-23. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1018>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1018>

### 1. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan menghasilkan informasi finansial yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan pihak eksternal maupun pihak internal suatu entitas. Laporan keuangan dikatakan relevan jika memenuhi syarat (1) nilai umpan balik (*feedback value*) (2) manfaat prediksi (*predictive value*) (3) tepat waktu dan (4) lengkap (KK, p.37)]. Jika laporan keuangan pemerintah tidak tepat waktu dalam penyampaiannya, maka peranan dari informasi keuangan yang dihasilkan menjadi usang bagi pihak pengambil keputusan.

Terkait dengan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat (3) diterangkan bahwa laporan keuangan disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Kemudian laporan keuangan pemerintah daerah tersebut setelah diaudit oleh BPK, selanjutnya diserahkan BPK ke DPRD maksimal dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah (UU Nomor 15 tahun 2004 pasal 17 (1). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1 disebutkan, bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Walaupun sudah terdapat aturan yang mengatur mengenai batas maksimum pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah, tetap saja masih banyak pemerintah daerah yang menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah terlambat ke BPK.

Tabel 1. Daftar Pemerintah Daerah yang Menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Tepat Waktu

Tahun	Provinsi	Kota	Kabupaten	(%)
2011	28	85	313	81%
2012	26	80	309	79%
2013	29	88	339	87%
2014	34	91	379	94%
2015	34	91	408	98%
2016	34	92	411	99%
2017	34	93	415	100%

Sumber : IHPS BPK Semester I (www.bpk.go.id)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hanya di tahun 2017, baru semua pemerintah daerah menyerahkan LKPD ke BPK dengan tepat waktu. Sebelum tahun 2017, masih terdapat pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah ke BPK. Hal ini tentunya menarik diteliti untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah terlambat menyerahkan LKPD ke BPK. Ketika LKPD ini terlambat diserahkan ke BPK, maka penyerahan LKPD yang telah diaudit ke DPRD juga pasti akan terlambat.

Hasil audit BPK menunjukkan tingkat integritas informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang diaudit (Chang, Dasgupta dan Hilary, 2009). Dengan demikian dari segi tata kelola keuangan suatu daerah, opini adalah sarana bagi masyarakat dalam menilai apakah tatakelola keuangan didaerahnya telah dikelola dengan baik atau tidak. *Qualified audit opinion* dianggap berita buruk yang mengarah pada perlambatan proses pelaporan (Gajevszky, 2013)

Penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan telah dilakukan, baik sektor *private* (perusahaan yang *listing* di pasar modal) maupun di sector pemerintahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan ini dipengaruhi oleh profitabilitas (Savitri, Andreas dan Surya, 2019; Al Daoud, Ku Ismail dan Lode, 2014; Rahmawati, 2018), ukuran entitas (Rahmawati, 2018; Hashim dan Jambari, 2013; Putra dan Wilopo, 2017; Savitri et al., 2019), ukuran dewan komisaris (Al Daoud et al, 2014; Joened dan Damayanthi, 2016), umur entitas (Iyoha, 2012; AL-Tahat, 2015; Karlina, Lindrianasari dan Gamayuni, 2018), struktur kepemilikan (Savitri et al, 2019), jenis usaha (Iyoha, 2012; Alkhatib dan Marji, 2012), pertumbuhan entitas (AL-Tahat, 2015), leverage (Alkhatib dan Marji, 2012), temuan audit (Cagle, Flesher dan

Pridgen, 2014; Karlina, Lindrianasari dan Gamayuni, 2018) opini audit (Cagle et al., 2014; Gajevszky, 2013; Putra dan Wilopo, 2017; Rahmawati, 2018), kemandirian daerah (Rachmawati, Rini dan Fitri, 2016), tipe pemda, jumlah SKPD, dan belanja daerah (Wicaksono dan Sutaryo, 2017).

Penelitian ini menggunakan struktur formal organisasi dan fungsi administrasi sebagai indikator dari karakteristik pemerintah daerah. Seperti pendapat Damanpour dan Evan (1984) dan Patrick (2007) yang menemukan bahwa untuk mengadopsi suatu inovasi administrasi, termasuk penyusunan laporan keuangan, melibatkan struktur formal yang ditunjukkan dengan deferensial fungsi dan proses administrasi yang menunjukkan pelaku adopsi inovasi administrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati et al., (2016) meneliti pengaruh lokal politik pemerintahan (yang diwakili kemandirian daerah, lokasi daerah, kepala daerah yang terpilih kembali) dan kompetensi manajerial audit (diwakili posisi dan performa LKPD, opini audit dan temuan audit) terhadap ketepatanwaktuan pelaporan LKPD di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan LKPD. Sedangkan opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan LKPD. Adapun variabel yang lain tidak mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan LKPD. Opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK selain dari WTP dan WTP-DPP yaitu WDP, TW, dan TMP akan memperpanjang waktu dari penerbitan laporan keuangan audit. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gajevszky (2013), tetapi sejalan dengan hasil penelitian Cagle et al., (2014).

Karlina et al., (2018) meneliti pengaruh ukuran pemda, umur pemda, pengalaman kepala daerah, temuan audit, opini audit dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketepatanwaktuan LKPD yang dinyatakan sebagai *audit report lag* di Indonesia. Hasilnya, umur pemda dan temuan audit yang berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan LKPD. Ukuran pemda, pengalaman kepala daerah, opini audit dan DAK tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan LKPD.

Cagle et al., (2014) meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan audit pada pemerintah daerah di United States. Menggunakan variabel *audit delay*, temuan audit,

opini audit, hutang jangka panjang, *single audit*, lingkungan audit, jarak/lokasi daerah dan keterlibatan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit, opini selain *unqualified opinion* (WTP), jarak/lokasi daerah terhadap auditor berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan (*audit delay*)

Penelitian ini dilakukan dengan motivasi hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten serta terdapat *gap*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan status daerah) dan opini audit, terhadap ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.

### Landasan Teori Dan Hipotesis

#### Teori Organisasi

McAuley, Duberley dan Johnson (2007) menyatakan bahwa teori organisasi merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana mengkoordinasi orang-orang di dalamnya dalam mencapai tujuan tertentu. Pemerintah merupakan organisasi yang berkewajiban menyajikan informasi laporan keuangan yang berkualitas, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan. Adopsi dan pemilihan kebijakan akuntansi dapat didefinisikan sebagai inovasi administrasi (Patrick, 2007).

Di dalam organisasi orang-orang saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintahan merupakan suatu organisasi memiliki ciri-ciri yang membedakan antara organisasi pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lain. Dalam teori organisasi dipelajari tentang tatacara dan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam suatu organisasi, dalam hal ini kegiatan pemerintah daerah adalah untuk melakukan tatakelola keuangan dan kebijakan dalam pemerintahan. Pemerintah daerah adalah suatu organisasi dimana tujuan dari pemerintah daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

#### Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006), karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan

perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian karakteristik pemerintah daerah adalah ciri atau sifat khas yang khusus yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah telah digunakan dalam beberapa penelitian, dengan menggunakan beberapa indikator untuk menunjukkan ciri khusus pemerintah daerah.

Indikator tersebut diantaranya menggunakan ukuran pemerintah daerah (Patrick, 2007; Suhardjanto, Rusmin, Putriesti dan Brown, 2010; Setyaningrum, Gani, Martani dan Kuntadi, 2013; Nuraeni, 2014; Pratiwi dan Aryani, 2016; Wicaksono dan Sutaryo, 2017; Pahlevi dan Setiawan, 2017), *leverage* (Lin dan Raman, 1998; Okfitasari, Antin, 2015; Okfitasari dan Purnomo, 2017), *intergovernmental revenue*, jumlah departemen, intensitas administrasi, spesialisasi tugas, belanja pemerintah (Patrick, 2007; Lin dan Raman, 1998; Okfitasari, 2015; Ara, Herwanti dan Pituringsih, 2016; Okfitasari dan Purnomo, 2017; Naopal, Rahayu dan Yudowati, 2017), umur dan tipe pemerintah daerah (Nuraeni, 2014; Wicaksono dan Sutaryo, 2017). Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik pemerintahan daerah yaitu ukuran daerah, kekayaan daerah yang diwakili dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, umur daerah dan status daerah.

#### Opini Audit

Opini atas LKPD adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas system pengendalian intern (<http://www.wikiwand.com/id>). Terdapat 4 jenis opini audit BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

#### Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan

Owusu-Ansah (2000) menyatakan ketepatanwaktuan (*timeliness*) adalah kualitas informasi yang tersedia telah direncanakan dan diselesaikan dengan baik. Al Daoud et al., (2014) menyatakan secara umum, terdapat dua aspek terhadap ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan

yaitu: (1) *audit report lag*; dan (2) *financial reporting lag*. Adapun Dyer dan McHugh (1975), menyatakan terdapat tiga jenis keterlambatan yaitu: (1) *preliminary lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa, (2) *auditor's report lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani, (3) *total lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan diterima oleh bursa.

Setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, pemerintah daerah melalui kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan daerah kepada BPK dalam waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian penyampaian laporan keuangan disampaikan oleh pemerintah daerah kepada BPK, selanjutnya BPK melakukan audit terhadap LKPD yang disusun oleh pemerintah daerah. BPK mendapatkan waktu 2 bulan untuk mengaudit LKPD yang dibuat oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan *financial reporting lag* yaitu jumlah hari penyerahan LKPD dari pemerintah daerah ke BPK.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **1) Ukuran Pemerintah Daerah dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan**

Suatu entitas yang besar akan memiliki tenaga akunting, sistem informasi akuntansi yang modern dan system pengendalian intern yang bagus dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga penyusunan laporan keuangan akan lebih cepat disajikan (Owusu-Ansah, 2000; Siregar, 2015). Dengan konsidi ini, semakin besar suatu entitas maka akan semakin cepat dalam menyajikan laporan keuangannya. Hal ini selaras dengan temuan dari Alkhatib dan Marji (2012) dan Owusu-Ansah dan Leventis (2006). Artinya semakin besar entitas, maka akan semakin tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangannya. Berdasar uraian ini, dapat dikembangkan hipotesis:

H<sub>1</sub>: Ukuran daerah berpengaruh negatif terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan.

#### **2) PAD dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan**

Sebuah perusahaan menghitung kekayaannya dari pendapatan yang dihasilkannya selama proses

bisnis perusahaan berjalan selama satu tahun. Begitu juga pemerintah daerah menghitung kekayaan mereka dengan menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai acuannya. Total PAD menunjukkan apakah daerah tersebut memiliki banyaknya kekayaan atau penghasilan daerahnya. Semakin kaya suatu daerah maka akan semakin baik kualitas pengelolaan keuangan daerah tersebut, dimana pemerintah daerah mampu untuk merekrut tenaga ahli dan menyediakan fasilitas yang memadai dalam mengelola keuangan daerahnya. Abdullah (2010) menemukan pengaruh positif signifikan PAD dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Artinya akan semakin besar muncul tekanan publik untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dengan tepat waktu. Semakin besar PAD pemerintah daerah, maka semakin laporan keuangan daerah disajikan tepat waktu. Berdasar uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan:

H<sub>2</sub>: PAD berpengaruh positif pada ketepatanwaktuan laporan keuangan.

#### **3) Belanja Daerah dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan**

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan, bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Okfitasari (2015) menemukan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin tinggi belanja pemerintah daerah, maka seharusnya semakin baik dan berkualitas pelayanan yang diberikan ke masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan semakin kompleks pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Berdasar uraian di atas, maka hipotesis yang dikembangkan:

H<sub>3</sub>: Belanja daerah berpengaruh positif pada ketepatanwaktuan laporan keuangan.

#### **4) Umur Daerah dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan**

Owusu-Ansah (2000) menyatakan ketika suatu perusahaan telah berkembang dengan baik, maka perusahaan akan memiliki akuntan internal yang mampu menyiapkan data dan informasi lebih cepat

dan meminimalkan keterlambatan pelaporan laporan keuangan. Semakin lama umur pemerintah daerah, maka akan semakin berpengalaman suatu perusahaan/pemerintah daerah dalam mengelola dan menyusun laporan keuangannya. Dengan demikian akan semakin tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan:

H<sub>4</sub>: Umur daerah berpengaruh negatif pada ketepatanwaktuan laporan keuangan

**5) Status Daerah dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan**

Ketersediaan sumber daya yang lebih baik akan mendorong penyusunan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas. Semakin lengkap sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki suatu daerah, akan semakin mendorong penyampaian LKPD dengan tepat waktu (Taufik dan Bandi, 2015). Kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah menjadi lebih kuat, sehingga pemerintah terdorong untuk menyusun dan menyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari uraian di atas, maka hipotesis yang dikembangkan:

H<sub>5</sub>: Status daerah berpengaruh positif pada ketepatanwaktuan laporan keuangan

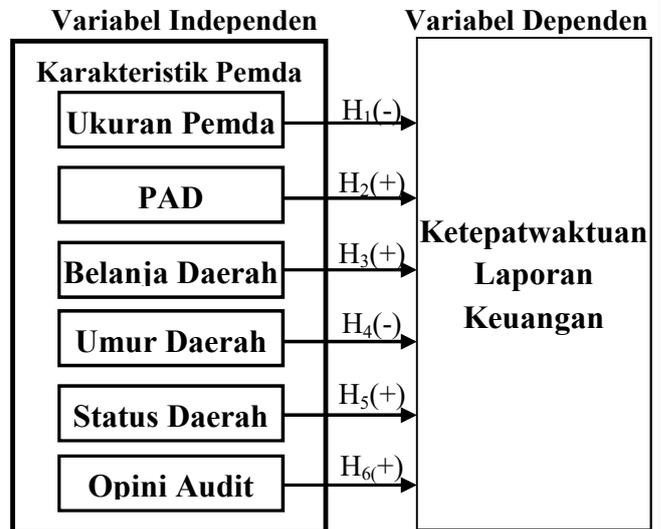
**6) Opini Audit dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan**

Jangka waktu dalam penyampaian laporan keuangan mengindikasikan bagaimana pemerintah daerah menyelesaikan pelaporan keuangannya. Semakin tepat waktu, maka menunjukkan pemerintah daerah mampu menyusun laporan keuangan dengan cepat, sehingga laporan tersebut bisa segera diaudit oleh BPK. Menurut McLelland dan Giroux (2000) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) merupakan sebuah pertanda buruk bagi pengguna laporan keuangan. Opini yang diberikan BPK berupa opini selain wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar ataupun tidak mengemukakan pendapat dapat dianggap sebuah catatan buruk kinerja keuangan

pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan:

H<sub>6</sub>: Opini audit berpengaruh positif pada ketepatanwaktuan laporan keuangan.

Dari hipotesis di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Skema Konseptual

**2. METODE PENELITIAN**

**Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan**

Populasi penelitian ini yaitu LKPD kota dan kabupaten di Indonesia tahun 2014 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak semua populasi tersebut diambil sebagai sampel, akan tetapi sampel yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria tertentu (Sekaran dan Roger, 2010). Kriteria yang digunakan adalah laporan keuangan sudah diaudit BPK, sehingga diketahui opini audit atas laporan keuangan tersebut dan memiliki kelengkapan data seperti status daerah. Data diperoleh dari *data base* BPK pada tahun 2014, sedangkan data non keuangan diperoleh dari LHP BPK maupun dari *website* pemerintah daerah di Indonesia.

**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Definisi dan pengukuran operasional masing-masing dijelaskan dibawah ini:

Tabel 2 Variabel dan Pengukuran Operasional

Variabel	Sub Variabel	Pengukuran	Skala	Sumber
Variabel Independen (X)	Ukuran Pemda (X1)	Log Total Aset	Ordinal	Karlina et al, 2018, Owusu-Ansah dan Leventis (2006), Hashim et al (2013), Savitri et al (2019)
	PAD (X2)	Log Total PAD	Ordinal	Nuraeni dan Martani, 2012; Pratiwi dan Aryani, 2016

Variabel	Sub Variabel	Pengukuran	Skala	Sumber
	Belanja (X3)	Log Total Belanja	Ordinal	Lin dan Raman,1998, Wicaksono dan Sutaryo, 2017, Okfitasari, 2015, Siregar (2015)
	Umur (X4)	Jumlah tahun	Ordinal	Wicaksono et al, 2017; Okfitasari (2015); Karlina et al (2018)
	Status (X5)	Kota/Kabupaten	Dummy	Wicaksono et al (2017)
	Opini Laporan Keuangan	1.Disclaimer 2.Tidak Wajar 3.WDP 4.WTP	Likert	BPK
Variabel dependen (Y)	Waktu Penyampaian laporan keuangan (Y)	Jumlah Hari	Ordinal	Dyer dan Hugh, 1975; Rosadi et al, 2017

**Model Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan alat analisis data yaitu regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Persamaan regresi berganda dirumuskan berikut ini:

$$TIMELINESS_{jt} = \alpha + \beta_1 ASET_{jt} + \beta_2 PAD_{jt} + \beta_3 BELANJA_{jt} + \beta_4 UMUR_{jt} + B_5 STATUS_{jt} + B_6 OPINI_{jt} + \epsilon_{jt}$$

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Hasil Penelitian**

**1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan populasi kota/kabupaten se-Indonesia di tahun 2014. Data terkait dengan LKPD diperoleh dari *data base* Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2014. Data non keuangan diperoleh dari Hasil Pemeriksaan SPI, Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan *web* masing-masing pemerintah kota/kabupaten terkait.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh sampel penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3 Pemilihan Sampel Penelitian**

	Jumlah
Jumlah populasi kota/kabupaten se-Indonesia	514
Sampel yang tidak memenuhi	-89
Sampel yang digunakan penelitian	453

**Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif terkait mengenai data-data dan penyebaran data yang digunakan dalam proses penelitian. Penggambaran umum yang dijelaskan

dalam analisis ini meliputi nilai rata-rata (*means*), nilai maksimum, nilai tminimum dan nilai penyimpangan atau penyebaran data (standar deviasi) pada penelitian ini. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat di tabel berikut ini:

**Tabel 4 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemda	453	21.60	30.87	28.46	.67
PAD	453	21.66	28.26	25.16	1.14
Belanja	453	24.69	29.49	27.59	.60
Umur	453	1.00	268.00	44.07	39.88
Status	453	.00	1.00	.19	.39
Opini	453	1.00	4.00	3.30	.69
Valid N (listwise)	453				

Dari tabel 4 dapat dilihat nilai ln aset maksimum sebesar 30,87 dimiliki oleh Kota Merdan dan nilai minimum 21,60 dimiliki oleh Kabupaten Morowali Utara, serta nilai rerata ln total aset sebesar 28,46. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kota/kabupaten di Indonesia memiliki sumber daya yang besar. Ln PAD maksimum sebesar 28,26 dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat, sedangkan nilai ln PAD minimum sebesar 21,66 dimiliki oleh Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan nilai rerata ln PAD sebesar 29,49. Nilai rerata ln PAD ini menunjukkan bahwa kota/kabupaten di Indonesia memiliki PAD yang cukup besar, sehingga menunjukkan kemandirian daerah yang sudah bagus.

Untuk ln belanja daerah maksimum sebesar 29, 49 dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kutaneegara, sedangkan nilai minimum sebesar 24,69 dimiliki oleh Kota Magelang. Nilai rerata dari ln belanja sebesar 27,59 menunjukkan bahwa pembelanjaan yang dilakukan oleh kota/kabupaten di Indonesia cukup besar. Adapun nilai maksimum umur pemerintah daerah yaitu 268 tahun dimiliki oleh Kabupaten Probolinggo, sedangkan nilai minimum umur daerah sebesar 1 tahun dimiliki oleh Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Mahakam Ulu. Adapun nilai rerata 44,07 tahun. Opini audit laporan keuangan kota/kabupaten dengan nilai minimum 0, dan nilai maksimum 4,0 dengan nilai rerata 3,33 . Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Indonesia secara umum mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemda tahun 2014 masih banyak yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**2. Analisis Regresi Berganda**

Model pengujian regresi linear berganda digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini. Model pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan data-data dari masing-masing pemerintah daerah dari masing-masing variabel yang diuji. Dari hasil uji regresi liner berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien	Nilai t	Sig.
(Constant)	189.935	3.782	.000
Ukuran Pemda	7.226	3.071	.002*
PAD	-6.514	-4.770	.000*
Belanja	-3.335	-1.276	.203
Umur	-.049	-1.797	.073
Status	.640	.254	.800
Opini	-.984	-.710	.478
<i>R Square</i>			.119
<i>Adj. R Square</i>			.108
<i>Nilai f</i>			10.080
<i>Regression*</i>			.000*

a. Predictors: (Constant),

ASET,PAD,BELANJA,UMUR,STATUS, OPINI

b. Dependent Variable:TIMELINE

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah yaitu ukuran daerah, PAD, belanja daerah, umur daerah, status daerah serta opini laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, dimana hasil regresi sebesar 0.000 lebih kecil dari 5%. Adapun nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,108 menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 10,8%, sedangkan sebesar 89,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan hasil di atas, maka persamaan regresi penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

$$TIMELINESS = 189.935 + 7.226 ASET - 6.514 PAD - 3.335 BELANJA - 0.049 UMUR + 0.640 STATUS - 0.984 OPINI$$

**3.2. Analisis Dan Pembahasan**

Dari hasil uji regresi atas variabel ukuran daerah menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti nilai signifikansi variabel ukuran daerah lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian Hipotesis 1 ditolak, dimana hipotesis beranggapan bahwa ukuran daerah berpengaruh negatif terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan. Temuan ini tidak sejalan dengan Owusu-Ansah (2000), Owusu-Ansah dan Leventis (2006), Siregar (2015), Alkhatib dan Marji (2012) dan Karlina dan Gamayuni (2018), tetapi hasil ini sejalan dengan temuan dari Hashim et al., (2013). Semakin besar suatu kota/kabupaten memiliki asset yang besar, maka akan semakin terlambat dalam menyajikan laporan keuangannya. Cohen dan Kaimenakis (2008) menjelaskan bahwa semakin besar jumlah asset, maka semakin banyak masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan sumber daya. Ketika pemda memiliki jumlah nilai aset yang besar akan memiliki tuntutan yang besar dalam melaporkan pengungkapan wajib ke publik. Semakin besar asset suatu kota/kabupaten maka akan semakin banyak pengawasan yang harus dilakukan dalam pengelolaan asset daerah yang akhirnya menimbulkan kesulitan dalam koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari hasil uji regresi atas variabel Penghasilan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap ketepatanwaktuan laporan

keuangan. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,00 yang berarti nilai signifikansi variabel PAD lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian Hipotesis 2 ditolak, dimana hipotesis beranggapan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Temuan ini tidak sejalan dengan Abdullah (2010), yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD, yang tentunya akan mendorong setiap pemda untuk menyajikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Temuan ini juga tidak sejalan dengan temuan Putri (2016) yang menyatakan tidak ada pengaruh PAD dengan ketepatan waktu laporan keuangan. Hal ini kemungkinan karena tata kelola pendapatan daerah kurang dikelola dengan baik, sehingga semakin besar penerimaan akan menimbulkan semakin terlambat penyajian laporan keuangan.

Dari hasil uji regresi atas variabel belanja daerah menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,203 yang berarti nilai signifikansi variabel belanja daerah lebih besar dari 0,05. Dengan demikian Hipotesis 3 ditolak. Hasil ini tidak selaras dengan temuan dari Okfitasari (2015) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Akan tetapi tanda negatif selaras dengan Wicaksono dan Sutaryo (2017) menunjukkan bahwa ketika suatu pemerintah daerah memiliki belanja daerah yang besar, maka ada kecenderungan pemerintah daerah akan semakin tepat waktu dalam melakukan pelaporan. Hal ini sebagai akibat ketika suatu pemerintah daerah melakukan belanja yang besar, maka pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut akan semakin diawasi.

Dari hasil uji regresi atas variabel umur daerah menunjukkan bahwa umur daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,073 yang berarti nilai signifikansi variabel umur daerah lebih besar dari 0,05. Dengan demikian Hipotesis 4 ditolak. Temuan ini tidak selaras dengan temuan dari Taufik dan Bandi (2015) dan Iyoha (2012). Hubungan negatif antara umur pemerintah daerah dan ketepatan waktu laporan keuangan selaras dengan Karlina et al., (2018) dan Owusu-Ansah (2000), yang menyatakan semakin berumur suatu pemerintah daerah, maka akan semakin tepat waktu penyajian laporan keuangannya.

Dari hasil uji regresi atas variabel status daerah menunjukkan bahwa status daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,800 yang berarti nilai signifikansi variabel status daerah lebih besar dari 0,05. Dengan demikian Hipotesis 5 ditolak. Temuan ini tidak sejalan dengan temuan dari Taufik dan Bandi (2015). Hal ini menunjukkan bahwa apapun status pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten tidak akan mempengaruhi laporan keuangan disampaikan dengan tepat waktu.

Dari hasil uji regresi atas variabel opini audit menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,478 yang berarti nilai signifikansi variabel opini audit lebih besar dari 0,05. Dengan demikian Hipotesis 6 ditolak. Hasil ini berbeda dengan temuan dari Cagle et al., (2014), Rachmawati et al., (2016) dan Putri (2016). Temuan ini sejalan dengan Karlina et al., (2018), Putra dan Wilopo (2017). Hubungan negatif antara opini audit dan ketepatan waktu laporan keuangan sejalan dengan temuan Joened dan Damayanti (2016). Dari statistik deskriptif dapat dilihat bahwa rata-rata opini audit yang diperoleh pemerintah daerah adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dimana hal ini mencerminkan bahwa rata-rata kesesuaian laporan keuangan pemda dengan SAP masih kurang. McLelland dan Giroux (2000) menyatakan opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) merupakan sebuah pertanda buruk bagi pengguna laporan keuangan.

#### **4. KESIMPULAN**

Pengujian hipotesis menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Sedangkan belanja daerah, umur daerah, status daerah dan opini audit tidak memiliki ketepatan waktu laporan keuangan. Semakin besar asset suatu pemerintah daerah, maka akan timbul kesulitan dalam pengelolaannya, sehingga memperlama penyusunan laporan keuangan yang berakibat laporan keuangan menjadi tidak tepat waktu. Adapun PAD yang semakin besar akan menimbulkan kesulitan tata kelola penerimaan daerah, akibatnya semakin lama laporan keuangan disajikan.

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk menambah variabel independen lainnya, mengingat bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 10,8% saja atas variabel dependen.

## **5. REFERENSI**

- Abdullah, H. (2010). *Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Al Daoud, Khaldoon Ahmad, Ku Ismail, Ku Nor Izah dan Lode, Nor Asma. (2014). The Timeliness of Financial Reporting among Jordanian Companies: Do Company and Board Characteristics, and Audit Opinion Matter? *Asian Social Science*, 10 (13), 191-201.
- Alkhatib, K., dan Marji, Q. (2012). Audit reports timeliness: Empirical evidence from Jordan. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 62, 1342 – 1349.
- AL-Tahat, Sager S.Y. (2015). Company Attributes and the Timeliness of Interim Financial Reporting In Jordan. *International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM)*, 4 (3), 6-16.
- Ara, S.C., Herwanti, Titik dan Pituringasih, E. (2016). Pengaruh Karakteristik Pempda Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pempda Kabupaten Di Pulau Sumba. 4 (1), 1 - 17.
- Cagle, Corey S., Flesher, Dale L., dan Pridgen, Annette B. (2014). Audit Report Timeliness of United States Local Governments: An Investigation of Entities Exceeding Reporting Deadlines. *Accountancy Business and the Public Interest*, 71 – 109.
- Chang, X., Dasgupta, S., dan Hilary, G. (2009). The Effect of Auditor Quality on Financing Decisions. *The Accounting Review*, 84 (4), 1085-1117.
- Cohen, S dan Kaimenakis, N. (2008). An Empirical Investigation of Greek Municipalities' Quality of Financial Reporting. In *Working Paper Series*.
- Damanpour, F., dan Evan, W. M. (1984). Organizational Innovation and Performance: The Problem of Organizational Lag. *Administrative Science Quarterly*, 29 (3), 392-409.
- Dyer, James C., dan McHugh, A.J. (1975). The Timeliness of the Australian Annual Report. *Journal of Accounting Research*, 13 (2), 204-219.
- Gajevszky, A. (2013). The Timeliness Of Financial Reporting In The Context Of European Union'S Emerging Economies. *Network Intelligence Studies*, 1 (2), 73-82.
- Hashim, F., Hashim, F., dan Jambari, A.R. (2013). Relationship between Corporate Attributes and Timeliness in Corporate Reporting: Malaysian Evidence. *Jurnal Teknologi*, 64 (2), 115–119.
- Iyoha, F.O. (2012). Company Attributes and The Timeliness of Financial Reporting in Nigeria. *Business Intelligence Journal*, 5 (1), 41-49.
- Joened, J.A., dan Damayanthi, I Gusti A.E. (2016). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Opini Auditor, Profitabilitas, Dan Reputasi Auditor Pada Timeliness Of Financial Reporting. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14 (1), 423-450.
- Karlina, Lindrianasari dan Gamayuni, R.R. (2018). Determinant Analysis of Audit Report Lag in Regional Governments In Indonesia. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 7 (4), 105-110.
- Lin, J.W., dan Raman, K. (1998). The Housing Value-Relevance of Governmental Accounting Information. *Journal of Accounting and Public Policy*, 17 (2), 91-118.
- McAuley, John, Duberley, Joanne dan Johnson, Phil. (2007). *Organization Theory: Challenges and Perspectives*. Prentice Hall.
- McLelland, Andrew J., dan Giroux, G. (2000). An empirical analysis of auditor report timing by large municipalities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19 (3), 263-281.
- Naopal, F., Rahayu, Sri dan Yudowati, S.P. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *ASSETS*, 7 (1), 56-68.
- Nuraeni. (2014). The Impact of Local Governments Characteristics To Audit Quality Indonesia Perspectives. *Finance and Banking Journal*, 16 (1), 87-103.

- Okfitasari, Antin dan Purnomo, Singgih. (2017). The Impact of The Local Governmental Characteristic on The Relevant Accounting Information of Local Governmental Financial Statement. *5th International Conference at Huachiew Chalermprakiet*. University Thailand.
- Okfitasari, Antin. (2015). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris: Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah). *Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta* , 2 (4), 10-25.
- Owusu-Ansah, S. (2000). Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Markets: Empirical Evidence from the Zimbabwe Stock Exchange. *Accounting and Business Research* , 30 (3), 241 - 254.
- Owusu-Ansah, Stephen dan Leventis, S. (2006). Timeliness of Corporate Annual Financial Reporting in Greece. *European Accounting Review* , 15 (2), 273–287.
- Pahlevi, A.R., dan Setiawan, D. (2017). Apakah Karakteristik Kepala Daerah Berdampak Terhadap Kinerja Pemerintahan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 8 (3), 427-611.
- Patrick, P. A. (2007). *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pratiwi, R., dan Aryani, Y Anni. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi* , 20 (2), 167-189.
- Putra, V.A., dan Wilopo, R. (2017). The effect of company size, accounting firm size, solvency, auditor switching, and audit opinion on audit delay. *The Indonesian Accounting Review* , 7 (1), 119 – 130.
- Putri, K. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia*. Skripsi FEB Universitas Lampung.
- Rachmawati, Sella, Rini, R., dan Fitri, Yessi. (2016). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* , 9 (1), 143 - 160.
- Rahmawati, E. (2018). Information content and determinants of timeliness financial reporting: Evidence from an emerging market. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* , 22 (4), 1-15.
- Savitri, E., Andreas dan Surya, R.A.S. (2019). Influencing Factors: The Timeliness of Financial Reporting Submissions. *Business and Management Studies* , 5 (1), 43-51.
- Sekaran, Uma dan Roger, B . (2010). *Research Method for Business, A Skill Building Approach. Fifth Edition*. New York: John Willey&SonInc.
- Setyaningrum, D., Gani, L., Martani, D., dan Kuntadi, C. (2013). The Effect of Auditor Quality on the Follow-Up of Audit Recommendation. *International Research Journal of Business Studies* , 6 (2), 89-104.
- Siregar, Baldrice. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JRAK* , 11 (2), 89-106.
- Suhardjanto, Djoko., Rusmin, Mandasari., Putriesti., dan Brown, Alistair. (2010). Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities. *Journal Public Policy* .
- Taufik, M.G., dan Bandi. (2015). Karakteristik Pemerintah Daerah, Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik Inspektorat Daerah dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* , 15 (1), 65-73.
- Wicaksono, A.K., dan Sutaryo. (2017). Faktor Penentu Audit Report Lag Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* , 7 (2), 209 – 228.